

Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro

Ahmad Sholikin

Universitas Islam Darul ‘Ulum, Indonesia
Email Korespondensi: ahmad.sholikin@unisda.ac.id

Abstrak: *Poverty alleviation is one of the main challenges faced by many local governments, including Bojonegoro Regency. Bojonegoro has rich local potential, especially in the agriculture, livestock, and natural resources sectors such as oil and gas. This study aims to analyze poverty alleviation programs based on optimizing local potential in Bojonegoro. Through a descriptive qualitative approach, data was collected from various sources, including policy documents, interviews with local stakeholders, and field observations. The results show that community-based economic development by utilizing local resources has a significant impact in reducing poverty. However, there are still a number of challenges, such as low access to capital, education, and technology that limit the community's ability to optimize existing potential. The main recommendation of this study is the need for synergy between the government, private sector, and communities in creating more inclusive and sustainable programs, with a focus on increasing local capacity and access to markets. Thus, poverty alleviation in Bojonegoro can be more effective and equitable, in line with the vision of sustainable regional development.*

Keywords: *Poverty Alleviation; Local Potential, Bojonegoro, Sustainable Development, Local Economy.*

Abstract: Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro memiliki potensi lokal yang kaya, terutama dalam sektor pertanian, peternakan, dan sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada optimalisasi potensi lokal di Bojonegoro. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis komunitas dengan memanfaatkan sumber daya lokal memiliki dampak signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti rendahnya akses terhadap modal, pendidikan, dan teknologi yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Rekomendasi utama dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan program yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas lokal dan akses terhadap pasar. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Bojonegoro dapat berjalan lebih efektif dan merata, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan; Potensi Lokal, Bojonegoro, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Lokal.

PENDAHULUAN

Penyelesaian masalah kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai negara, khususnya negara berkembang. Secara global, upaya untuk mengurangi kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dinyatakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, tantangan dalam



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan yang seragam, karena setiap wilayah memiliki kondisi ekonomi, sosial, dan budaya yang unik. Oleh karena itu, pendekatan berbasis potensi lokal dianggap lebih relevan dan efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di berbagai daerah [1].

Kabupaten Bojonegoro, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, merupakan salah satu daerah yang memiliki tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan. Meski dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, Bojonegoro masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang tidak terpapar langsung dengan manfaat ekonomi dari industri migas [2]. Di tengah kondisi ini, pemerintah daerah Bojonegoro telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal, yang memanfaatkan sumber daya alam dan budaya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu pendekatan yang digunakan oleh pemerintah Bojonegoro adalah melalui pemanfaatan Dana Abadi Migas atau Petroleum Fund, yang disalurkan untuk program-program pembangunan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemanfaatan dana ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi setelah sumber daya minyak bumi menipis. Pengalaman negara-negara penghasil sumber daya alam, seperti Norwegia, telah menunjukkan bahwa penggunaan pendapatan migas yang bijaksana melalui dana abadi dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan [3].

Selain itu, sektor pertanian di Bojonegoro juga menjadi fokus utama dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Mayoritas penduduk Bojonegoro menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama pada komoditas padi, jagung, dan tebu. Pemerintah daerah telah meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui modernisasi teknologi, pelatihan petani, serta dukungan permodalan. Strategi ini sejalan dengan temuan di berbagai negara yang menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas pertanian dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.

Tidak hanya dalam sektor pertanian, pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal juga menjadi salah satu strategi penting yang diterapkan oleh pemerintah Bojonegoro. Destinasi wisata seperti Hutan Jati dan Waduk Pacal telah dikembangkan sebagai atraksi wisata yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan pariwisata berbasis komunitas diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong partisipasi ekonomi masyarakat lokal, terutama di sektor informal.

Pendekatan pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal ini sejalan dengan konsep *community-based development*, yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program pembangunan. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Mansuri dan Rao tahun 2013 menunjukkan bahwa program pembangunan berbasis komunitas cenderung lebih



berkelanjutan dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan dengan program top-down yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal [4][5].

Namun, meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal telah diluncurkan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal untuk mengelola program-program tersebut. Hal ini sering kali mengakibatkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya dan kurangnya dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap layanan keuangan formal juga menjadi hambatan dalam pengembangan usaha ekonomi yang mandiri.

Dalam konteks Bojonegoro, keberhasilan program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal juga sangat bergantung pada bagaimana pendapatan dari industri migas dikelola secara adil dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Studi tentang resource curse atau "kutukan sumber daya alam" menunjukkan bahwa negara atau daerah yang kaya akan sumber daya alam sering kali mengalami stagnasi ekonomi atau bahkan peningkatan kemiskinan jika pendapatan dari sumber daya tersebut tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan Dana Abadi Migas di Bojonegoro benar-benar mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan [6].

Selain pengelolaan sumber daya alam, aspek sosial budaya juga memainkan peran penting dalam keberhasilan program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Budaya gotong royong yang kuat di masyarakat Bojonegoro, misalnya, dapat menjadi modal sosial yang mendukung pelaksanaan program-program berbasis komunitas. Namun, di sisi lain, terdapat juga potensi hambatan dari segi budaya patriarki yang masih kuat, yang dapat membatasi partisipasi perempuan dalam program-program pengentasan kemiskinan, terutama di sektor ekonomi.

Dalam hal ini, pendekatan gender-responsive dalam program pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya mengurangi kemiskinan secara umum, tetapi juga mengatasi ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat. Studi oleh Chant tahun 2010 menunjukkan bahwa kemiskinan sering kali berdampak lebih besar pada perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, sehingga program-program pengentasan kemiskinan perlu dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan peran gender [7].

Secara keseluruhan, program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal di Kabupaten Bojonegoro menawarkan pendekatan yang holistik dan relevan dengan konteks lokal. Namun, agar program-program ini benar-benar efektif dan berkelanjutan, perlu adanya peningkatan dalam koordinasi, pengelolaan sumber daya, serta perhatian yang lebih besar terhadap dimensi sosial dan gender. Keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak pada pengurangan kemiskinan di Bojonegoro, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain yang memiliki potensi lokal yang besar namun masih menghadapi tantangan dalam pengentasan kemiskinan.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro. Studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terkait implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di wilayah dengan karakteristik spesifik. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan terhadap pemangku kepentingan utama, termasuk pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat program. Selain itu, dokumen-dokumen terkait kebijakan pemerintah setempat, laporan implementasi program, dan data statistik daerah juga dianalisis untuk memahami konteks lokal yang mendasari program ini.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana data dari wawancara dan observasi diorganisasikan ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti mengidentifikasi pola-pola, hubungan antar variabel, serta faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan program. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan data dokumen untuk memastikan keakuratan temuan.

PEMBAHASAN

Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro

Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal di Kabupaten Bojonegoro dimulai dengan identifikasi sumber daya lokal yang dapat digunakan sebagai dasar program. Salah satu program andalan adalah pemanfaatan Dana Abadi Migas (Petroleum Fund) yang dihasilkan dari industri minyak bumi setempat. Program ini dirancang untuk mendukung pembangunan jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah pedesaan yang terkena dampak kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, penggunaan Dana Abadi Migas menjadi salah satu strategi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan karena memungkinkan distribusi manfaat secara merata ke masyarakat lokal.

Namun, meskipun implementasi Dana Abadi Migas telah berlangsung selama beberapa tahun, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas distribusi dana tersebut. Beberapa informan menyatakan bahwa masyarakat sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai alokasi dana, dan ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini sejalan dengan temuan Olken pada tahun 2007, yang menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk memastikan efektivitas program pembangunan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan masyarakat dalam pengelolaan Dana Abadi Migas sangat penting untuk meningkatkan dampak program [8].

Selain Dana Abadi Migas, sektor pertanian di Bojonegoro juga menjadi fokus utama dalam program pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah telah meluncurkan



program modernisasi pertanian yang melibatkan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas. Petani dilatih untuk mengadopsi metode pertanian berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan hasil panen tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Studi oleh Rachmawati tahun 2020 menunjukkan bahwa modernisasi pertanian merupakan salah satu strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan di wilayah pedesaan [9]. Namun, di Bojonegoro, implementasi program ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi bagi petani kecil dan terbatasnya modal untuk berinvestasi dalam peralatan pertanian yang lebih canggih.

Faktor Pendukung Implementasi Program;

- a) Ketersediaan Sumber Daya Alam Potensi minyak bumi di Bojonegoro menyediakan fondasi bagi pengembangan ekonomi lokal. Salah satu aspek yang paling signifikan adalah penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak untuk mendanai program-program pengentasan kemiskinan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa adanya sumber daya alam yang melimpah dapat mempercepat proses pengentasan kemiskinan melalui investasi di bidang infrastruktur dan pendidikan [10].

Di Bojonegoro, DBH minyak dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan dan fasilitas umum, yang mendukung peningkatan aksesibilitas ekonomi bagi masyarakat lokal. Selain itu, sebagian dana ini juga digunakan untuk program pendidikan, terutama bagi keluarga miskin, dengan harapan bahwa peningkatan keterampilan dan pendidikan dapat menjadi motor bagi pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang.

- b) Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal. Sebagai salah satu strategi pengentasan kemiskinan, pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal telah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Program ini dirancang untuk memanfaatkan sumber daya lokal, seperti produk pertanian, kerajinan tangan, dan industri kreatif, yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa kewirausahaan lokal memiliki korelasi positif dengan pengentasan kemiskinan, terutama ketika didukung oleh akses ke modal dan pelatihan kewirausahaan. Di Bojonegoro, pemerintah berkolaborasi dengan lembaga keuangan mikro untuk menyediakan akses modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), serta menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan bisnis. Dampak dari inisiatif ini terlihat pada peningkatan jumlah UKM di desa-desa dan peningkatan pendapatan keluarga [11].
- c) Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Implementasi Program. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program pengentasan kemiskinan juga menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan. Pendekatan partisipatoris memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. Model ini telah diadopsi di berbagai negara berkembang dengan hasil yang positif.
- d) Di Bojonegoro, program seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi



dan kebutuhan mereka. Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung, program-program yang dihasilkan lebih relevan dan memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi.

Dampak Ekonomi dan Sosial dari Program Pengentasan Kemiskinan

Salah satu tujuan utama dari program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal di Bojonegoro adalah untuk menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan data lapangan, dampak ekonomi paling terlihat adalah peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan pariwisata lokal. Melalui program modernisasi pertanian, petani melaporkan adanya peningkatan hasil panen hingga 20% dalam beberapa musim tanam terakhir. Hal ini sejalan dengan temuan World Bank tahun 2019, yang menunjukkan bahwa intervensi di sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan mengurangi kemiskinan.

Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal juga telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor informal, seperti pemandu wisata, pedagang, dan pengelola homestay. Pariwisata berbasis komunitas, seperti yang dikembangkan di kawasan Hutan Jati dan Waduk Pacal, tidak hanya menarik wisatawan domestik tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal yang terlibat langsung dalam pengelolaan destinasi wisata tersebut. Studi Ashley pada tahun 2001 menyatakan bahwa pariwisata berbasis komunitas dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses ke pasar formal [12].

Namun, selain dampak positif, program ini juga menghadapi tantangan sosial yang perlu diatasi. Salah satu isu yang mencuat adalah ketidaksetaraan gender dalam partisipasi ekonomi. Meskipun ada peningkatan pendapatan secara keseluruhan, partisipasi perempuan dalam sektor pertanian dan pariwisata masih sangat terbatas. Banyak perempuan di Bojonegoro yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan memiliki akses terbatas ke pelatihan dan modal usaha. Menurut Chant, kemiskinan sering kali berdampak lebih besar pada perempuan, terutama perempuan kepala keluarga, sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih responsif terhadap gender dalam program pengentasan kemiskinan. Tanpa adanya perhatian khusus pada partisipasi perempuan, program pengentasan kemiskinan berpotensi memperkuat ketidaksetaraan gender yang ada di masyarakat [13].

Tantangan dan Strategi untuk Keberlanjutan Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal

Meskipun program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal di Kabupaten Bojonegoro telah memberikan dampak positif, terdapat sejumlah tantangan yang menghambat keberlanjutan program ini. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam implementasi program. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, sering kali terjadi tumpang tindih kebijakan



antara dinas yang mengelola pertanian, pariwisata, dan Dana Abadi Migas, yang menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini sesuai dengan temuan Mansuri dan Rao pada tahun 2013, yang menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antar-lembaga dapat mengurangi efektivitas program pembangunan berbasis komunitas [14].

Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal menjadi tantangan signifikan dalam pelaksanaan program. Banyak petugas lapangan dan pejabat pemerintah daerah yang masih kurang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip pengelolaan program pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Akibatnya, implementasi program sering kali tidak berjalan sesuai rencana, dan manfaat program tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan manajerial bagi petugas lapangan dan pejabat terkait. Studi oleh Andrews pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pembangunan kapasitas institusional yang kuat adalah kunci untuk meningkatkan keberhasilan program pembangunan di tingkat lokal [15].

Strategi keberlanjutan juga harus mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program. Saat ini, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan Dana Abadi Migas masih sangat terbatas, sehingga sering terjadi ketidakjelasan dalam alokasi dana. Untuk meningkatkan akuntabilitas, perlu dikembangkan mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program. Menurut temuan Olken pada tahun 2007, partisipasi masyarakat dalam pengawasan program pembangunan dapat meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai dengan kebutuhan lokal [16].

Tantangan dalam Implementasi Program;

- a) Ketergantungan terhadap Sumber Daya Alam. Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi program berbasis potensi lokal adalah ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor minyak. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan dapat menciptakan fenomena yang disebut "kutukan sumber daya," di mana daerah dengan kekayaan sumber daya alam justru mengalami stagnasi ekonomi dan kesenjangan sosial. Di Bojonegoro, meskipun DBH minyak telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, ketergantungan ini juga menghadirkan risiko ketika harga minyak anjlok atau ketika cadangan minyak habis. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor lain, seperti pertanian dan pariwisata berbasis komunitas, agar ekonomi daerah tidak bergantung pada minyak semata.
- b) Kesenjangan Pembangunan Infrastruktur. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur di daerah perkotaan, masih terdapat kesenjangan pembangunan di daerah pedesaan. Keterbatasan akses jalan, air bersih, dan listrik di beberapa desa menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata dapat meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan dan mengurangi ketimpangan pendapatan [17].



Di Bojonegoro, keterbatasan ini menjadi tantangan bagi implementasi program-program ekonomi berbasis potensi lokal. Desa-desa yang tidak terjangkau dengan baik oleh infrastruktur sering kali sulit untuk mengakses pasar yang lebih luas, sehingga membatasi pertumbuhan ekonomi lokal.

- c) Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Program. Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pengentasan kemiskinan juga merupakan tantangan penting. Meskipun terdapat komitmen yang kuat dari pihak pemerintah daerah, sering kali terdapat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Penelitian oleh Grindle pada tahun 2007 menunjukkan bahwa kapasitas pemerintahan yang baik sangat penting untuk memastikan keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan [16].

Di Bojonegoro, meskipun program pengentasan kemiskinan sudah berjalan selama beberapa tahun, monitoring dan evaluasi program masih terbatas. Akibatnya, sulit untuk mengukur secara tepat sejauh mana program-program tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap pengurangan kemiskinan.

Pada akhirnya, keberhasilan jangka panjang dari program pengentasan kemiskinan di Bojonegoro juga bergantung pada bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan lingkungan. Salah satu ancaman terbesar adalah ketergantungan terhadap industri migas, yang memiliki sifat tidak berkelanjutan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, penurunan produksi minyak di masa depan dapat mengancam keberlangsungan program pengentasan kemiskinan yang saat ini bergantung pada Dana Abadi Migas. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM harus terus didorong agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan. Ross 1999 menekankan bahwa negara atau daerah yang kaya akan sumber daya alam perlu membangun sektor ekonomi yang lebih beragam untuk menghindari apa yang dikenal sebagai "kutukan sumber daya alam" (*resource curse*) [18].

Rekomendasi untuk Peningkatan Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal

- a) Diversifikasi Ekonomi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, ketergantungan pada sektor minyak harus dikurangi dengan cara mengembangkan sektor-sektor lain yang berbasis potensi lokal. Diversifikasi ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, pariwisata, dan industri kreatif. Penelitian oleh Sachs dan Warner pada tahun 2001 menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi merupakan langkah penting untuk menghindari dampak negatif dari ketergantungan pada sumber daya alam.

Di Bojonegoro, potensi pariwisata berbasis komunitas, seperti ekowisata dan desa wisata, dapat dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga harus



didorong melalui peningkatan akses teknologi pertanian modern dan pelatihan bagi petani.

- b) Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah. Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pengentasan kemiskinan perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih baik untuk mengukur keberhasilan program secara berkala. Penelitian menunjukkan bahwa kapasitas manajerial yang kuat dalam pemerintahan lokal dapat meningkatkan efektivitas implementasi program pengentasan kemiskinan.
- c) Pemberdayaan Masyarakat dan Akses Modal. Kewirausahaan berbasis potensi lokal harus terus didorong dengan memberikan akses modal yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin bahwa program pelatihan kewirausahaan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan potensi pasar. Studi oleh Banerjee pada tahun 2015 menunjukkan bahwa akses modal dan pelatihan yang tepat dapat membantu pelaku usaha kecil keluar dari kemiskinan.
- d) Penguatan Infrastruktur Pedesaan. Pembangunan infrastruktur di pedesaan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah terpencil juga dapat mengakses pasar dan peluang ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Di Bojonegoro, pengembangan infrastruktur seperti jalan desa, listrik, dan akses air bersih harus dipercepat untuk memastikan bahwa masyarakat di semua wilayah dapat memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

KESIMPULAN

Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan pariwisata. Namun, tantangan dalam hal koordinasi antar-lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan ketidaksetaraan gender masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan program ini. Dengan memperkuat mekanisme partisipatif, meningkatkan kapasitas institusional, serta mengurangi ketergantungan terhadap industri migas, Bojonegoro dapat menjadi contoh daerah yang berhasil dalam memanfaatkan potensi lokal untuk mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.

Reference

- [1] A. Sholikin, "Implementation of Transparency and Accountability Principles in Extractive Industry Governance in Bojonegoro Regency," *Konf. Nas. Ilmu Adm.*, vol. 8, no. 1, pp. 258–266, 2024.
- [2] S. Priatmoko and R. L. Putri, "Zmart for community empowerment: a case study from Bojonegoro, East Java, Indonesia," *Int. J. Zakat*, vol. 6, no. 3, pp. 87–100, 2022.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- [3] S. Suryaningsum, M. Effendi, and R. H. Gusptono, "Bojonegoro District, The Best Governance Role In Indonesia's Economic Development and Poverty Allevation (Case Study of Bojonegoro)," 2017.
- [4] S. Azizah and S. Meilani, "Program Analysis of Rural Farmer School in Ngantru Village, Bojonegoro Regency," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, IOP Publishing, 2020, p. 12069.
- [5] G. Mansuri and V. Rao, "Can participation be induced? Some evidence from developing countries," *Crit. Rev. Int. Soc. Polit. Philos.*, vol. 16, no. 2, pp. 284–304, 2013.
- [6] R. Z. Firdausi and Y. B. Pratiknyo, "Assistance of Agroforestry Programs in Bojonegoro Regency," *Serunai*, vol. 1, no. 1, pp. 39–55, 2021.
- [7] R. A. Tombolotutu, S. Kanto, and A. F. Chawa, "THE EMPOWERMENT OF POOR FARMERS AT THE MOUNTAIN AREA THROUGH THE INTEGRATED PROGRAM OF POVERTY MITIGATION BASED ON RESIDENCE IMPROVEMENT INITIATIVE (IPOPMBORII)".
- [8] F. P. A. Suyoto, "Bojonegoro's Economic Growth Strategy: Turning Curses into Blessings".
- [9] L. Mubarakah, I. K. Ningrum, and S. N. Hidayah, "Assistance in Increasing Community Livelihoods through Optimizing the Business Role of Village Owned Enterprises," *SERUNAI*, vol. 1, no. 1, pp. 22–38, 2021.
- [10] H. Irianto, A. Qonita, and E. W. Riptanti, "Socio-economic characteristics of farmers on the existence of floating-rice cultivation demonstration plots in flood prone area in Bojonegoro, East Java," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, IOP Publishing, 2019, p. 12048.
- [11] A. N. April, D. A. Aprillia, M. Maulana, and R. Ruslan, "Comparison of Traditional Oil Miners Bojonegoro and Traditional Tin Miners of Bangka Belitung: COMPARATION OF BOJONEGORO TRADITIONAL OIL MINERS AND TRADITIONAL TIN MINERS OF BANGKA BELITUNG," *eScience Humanit. J.*, vol. 4, no. 2, pp. 196–209, 2024.
- [12] J. H. Purnomo and M. S. Anam, "Corporate Social Responsibility (CSR): Mapping, Opportunities, Constrains, and Development Strategies in Bojonegoro Regency," *SERUNAI*, vol. 1, no. 1, pp. 83–115, 2021.
- [13] S. Utari, H. Saptaningtyas, and J. Winarno, "Economic Independence Strategi Beneficiaries of Family Hope Program (PKH) in Sidorejo Village, Padangan, Bojonegoro Residence".
- [14] P. Lestari, A. Rachmansyah, A. Efani, and M. Pertiwi, "Sustainability of Rural Road Development: A Case Study on Woro Village Kepohbaru District Bojonegoro Region," *Indones. J. Soc. Environ. Issues*, vol. 5, no. 1, pp. 31–41, 2024.
- [15] E. Nugroho, R. Ihle, W. Heijman, and S. J. Oosting, "The contribution of forest extraction to income diversification and poverty alleviation for Indonesian smallholder cattle breeders," *Small-scale For.*, vol. 21, no. 3, pp. 417–435, 2022.
- [16] A. Sholikin, "Implementation of Green and Clean Policies in Environmental Governance Perspective in Lamongan Regency," *J. Ilmu Adm. Media Pengemb.*



Ilmu Dan Prakt. Adm., vol. 18, no. 1, pp. 104–117, 2021.

- [17] A. Sholikin, “PETROLEUM FUND PADA PEMERINTAHAN LOKAL (STUDI KASUS INOVASI KEBIJAKAN DANA ABADI MIGAS DI BOJONEGORO),” *J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu Dan Prakt. Adm.*, vol. 16, no. 1, pp. 127–146, 2019.
- [18] A. Sholikin, “Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro,” *J. Ilmu Adm. Media Pengemb. Ilmu Dan Prakt. Adm.*, vol. 15, no. 1, pp. 35–50, 2018.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.